

## Brimob Sterilisasi 20 Gereja



KR-Wahyu Priyanti.

**Tim Brimob Polda DIY saat sterilisasi di Gereja Keluarga Kudus Banteng.**

**SLEMAN (KR)** - Rangkaian perayaan Paskah di wilayah Hukum Polda DIY, berlangsung aman tanpa kejadian menonjol. Terciptanya situasi yang kondusif ini tak lepas dari peran serta masyarakat.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto menyebut, pengamanan Paskah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari penggelaran pasukan dan sterilisasi di sejumlah gereja. "Sejauh ini pelaksanaan Paskah berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan sesuai SOP yang sudah diterapkan oleh pimpinan," ujarnya, Jumat (2/4).

Sehari sebelumnya, Satuan Brimob Polda DIY melakukan sterilisasi gereja yang digunakan untuk rangkaian ibadah Paskah. Di wilayah hukum Polres Sleman, sebanyak 20 gereja disterilisasi oleh pasukan elite Polri ini. "Ada 81 gereja di Sleman dan yang disterilisasi sebanyak 20 gereja," ungkap Kabag Operasional Polres Sleman Kompol Danang Kuntadi di Gereja Keluarga Kudus Banteng Ngaglik, Kamis (1/4).

Dikatakan, saat perayaan Paskah, tiap gereja dijaga minimal 10 personel. Jumlah tersebut belum termasuk pengamanan tertutup dan pengamanan dari TNI, ormas dan internal gereja. Sterilisasi di Gereja Keluarga Kudus Banteng dipimpin Panit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda DIY Aiptu Hanang.

Romo Paroki Gereja Keluarga Kudus Banteng, Matheus Wahyudi MSR mengatakan, umat yang hadir pada ibadah Paskah 2021 adalah mereka yang telah mendaftarkan diri. Mereka juga mendapatkan barcode sebelum memasuki gereja. (Ayu)-f

## Pemkab Mulai Pendataan Keluarga

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman melalui Dinas P3AP2KB meluncurkan Pendataan Keluarga tahun 2021. Peluncuran ini diawali dengan pendataan keluarga Bupati Sleman di Rumah Dinas Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman di Padukuhan Jaban Tridadi Sleman, Kamis (1/4).

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan, Pendataan Keluarga 2021 (PK2021) dilaksanakan pada 1 April hingga 31 Mei 2021. PK2021 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai dengan wilayah administrasi terkecil.

"Target Kepala Keluarga yang akan didata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Sleman sebanyak 321.558 KK yang terbagi dalam metode formulir sebanyak 23.007 KK dan metode smartphone sebanyak 298.551 KK," jelas Linda.

Terkait itu, Bupati Kustini mengajak seluruh warga Sleman mensukseskan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut. Kader pendata akan mendatangi setiap keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Has)-f

64 WARGA BLEKIK POSITIF COVID-19

# Bupati Diminta Keluarkan SE Panduan Kegiatan

**SLEMAN (KR)** - DPRD Sleman meminta kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) panduan kegiatan masyarakat. Hal itu antisipasi terjadinya klaster baru. Mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan mengatakan, SE ini sangat penting untuk panduan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan. "Kami sudah koordinasi dengan Bupati dan akan mengeluarkan SE. Tapi kami minta, SE itu harus operasional dan aplikatif sehingga nanti bisa jadi panduan bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan," katanya didampingi Ketua Satgas Covid-19 DPRD

Sleman Abdul Kadir saat menyerahkan bantuan ke Dusun Blekik Sardonoharjo Ngaglik, Kamis (1/4).

Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok seperti beras, minyak, telur dan mi instan. Selain itu juga memberikan ribuan masker kain dan masker kesehatan. "Bantuan ini berasal dari anggota DPRD Sleman," terangnya.

Menurut Arif, pentingnya SE dikarenakan sebentar lagi akan banyak kegiatan

masyarakat seperti sadranan, pengajian, dan kegiatan lainnya. Dengan harapan masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatan sosial maupun keagamaan. Abdul Kadir menambahkan, kejadian di Blekik yang merupakan klaster takziah ini harus menjadi pembelajaran bersama. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diperketat lagi. "Ini dibutuhkan kesadaran semua pihak," tandasnya.

Sedangkan Koordinator Lapangan Satgas Covid-19 Kalurahan Sardonoharjo Zuli Susanto mengatakan, dengan adanya klaster takziah ini ada 64 orang warga Blekik yang positif



KR-Saifulah Nur Ichwan

**Arif Kurniawan menyerahkan bantuan ke Lurah Sardonoharjo.**

Covid-19. Sebagian besar masyarakat yang positif sudah dirujuk di Rusunawa Gemawang. "Ada sekitar 60 orang yang isolasi mandiri karena salah satu

dari keluarganya terpapar Covid-19. Sedangkan bagi warga yang keluarganya tidak positif, masih boleh melakukan aktivitas," jelasnya. (Sni)-f

## Forkopimda Bagikan Helm Gratis



KR-Istimewa

**Bupati Kustini dan Wabup Danang memakaikan helm gratis untuk pengguna jalan yang melintas.**

**SLEMAN (KR)** - Bupati bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sleman menggelar acara Kampanye Berjalan Lintas di GOR Pangukan Sleman, Kamis (1/4). Pada kesempatan itu dibagikan 150 helm gratis dan 300 masker kepada pengguna jalan yang melintas

Menurut Bupati Kustini, dipilihnya GOR Pangukan mengingat pada hari bertepatan pasaran Pahing sehingga tentu aktifitas masyarakat yang mengarah ke Pasar Sleman jauh lebih ramai.

"Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pemakai jalan, kemudian memberikan apresiasi kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas,"

jasarnya. Sementara Plt Kepala Dishub Sleman Arip Prmana menjelaskan, kampanye ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Diharapkan kegiatan ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, bijak berlalulintas. (Has)-f

## Indonesia Butuh Sebuah Haluan Negara

**SLEMAN (KR)** - Negara memerlukan arah/acuan untuk melakukan pembangunan nasional secara kuat, terukur, dan konsisten. Oleh karenanya kehadiran pokok-pokok haluan negara yang diatur dalam konstitusi merupakan sebuah keniscayaan.

Demikian dikatakan, Ketua Kolompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR Dr Intsiawati Ayus SH MH dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pokok Pokok Haluan Negara dan Amendemen Terbatas UUD 1945' di Ruang Multimedia, Gedung Pusat UGM, Kamis (1/4). FGD diikuti anggota DPD RI, Pimpinan Dewan Guru Besar UGM serta para Guru Besar UGM.

Tujuan FGD ini, kata Intsiawati, antara lain untuk menginventarisasi pandangan dan pendapat akademisi, pakar/ahli terhadap Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Yakni berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR dan penataan ke-

wenangan DPD. Sementara Guru Besar Fakultas Filsafat UGM Prof Dr Kaelan mengatakan, keberadaan haluan yang menjadi acuan pembangunan sebuah negara, sangatlah penting. Tanpa adanya haluan, pembangunan tidak akan berkesinambungan, sehingga yang terjadi hanya pemborosan anggaran. (Dev)-f



KR-Devid Permana

**Diskusi UGM dan DPD RI soal haluan negara.**

## JADI BAGIAN KEISTIMEWAAN DIY

# Pemda DIY Fokus dan Prioritaskan Pengarusutamaan Gender

**YOGYA (KR)** - Pengarusutamaan gender selalu menjadi fokus perhatian dan prioritas bagi Pemda DIY. Bahkan sejak 2002 sebelum provinsi lain mengenal pengarusutamaan gender, Pemda DIY telah berjuang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SE Gubernur DIY terkait dengan isu gender. Karena memperjuangkan kesetaraan gender di DIY menjadi salah satu keistimewaan DIY.

"Apabila persoalan itu tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, akan memunculkan permasalahan. Seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, penyimpangan perilaku masyarakat dan sederet masalah lainnya," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam acara pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020 di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Kamis (1/4).

Hadir mendampingi Gubernur DIY antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono yang merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Asekda Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Sumadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Rony Primanto Hari, Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnur Broto, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY serta aktivis gender, akademisi, pakar dan sebagainya. Sultan mengungkapkan

DIY memanfaatkan pemangku kepentingan untuk memaksimalkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk itu, pihaknya menekankan kepada setiap OPD untuk bisa saling silang bekerjasama mewujudkan kesetaraan ini demi mewujudkan harkat martabat kemul-

harapkan akan semakin meningkatkan kualitas perempuan di bidang ekonomi yang berperan sebagai pengambil keputusan dan meningkatnya perempuan sebagai legislator DPRD. "Dengan ditetapkannya indikator gender sebagai indikator kinerja utama Gu-



KR-Istimewa

**Gubernur DIY Sultan HB X saat verifikasi lapangan pemberian APE di DIY.**

berbur, maka para pemangku kepentingan lainnya tidak hanya memandang gender menjadi kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk setara," ungkapnya.

Sultan menambahkan, DIY sangat mengedepankan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan tanpa membedakan-bedakan, sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang sama. Hak dalam hal meningkatkan harkat dan martabatnya menuju tercapainya kesejahteraan. Untuk itu Pemda DIY dan seluruh pemangku kepentingan akan terus berupaya mewujudkan sekurang-kurangnya pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, serta menurunkan kesenjangan dan ketimpangan antar-wilayah.

"Saya berterima kasih karena pemerintah pusat telah memberikan apresiasi

kepada Pemda DIY. Sehingga dua kali berturut-turut berhasil meraih penghargaan tertinggi, yaitu Predikat Mentor dalam Anugerah Parahita Ekapraya. Penghargaan tersebut semakin memacu diri untuk bergerak lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan," terang Sultan.

Sementara Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani mengatakan DIY sudah mendapatkan anugerah mentor selama dua tahun berturut-turut. APE adalah penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anugerah ini merupakan apresiasi dari pusat atas kerja keras DIY mewujudkan kesetaraan gender untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

"Pemberian APE merupakan bentuk dukungan pusat dari Presiden Jokowi bagi Pemda yang memang telah mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender. DIY memang memberikan perkembangan terkait PUG selama dua tahun terakhir. Harapannya DIY bisa mempertahankan Kategori Mentor dan semakin memacu untuk bergerak lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan." tutur Rini. (Rial/ira)-f

## GILA IJAZAH (DIPLOMA DISEASE): SIAPA YANG SALAH??



**MATA AIR HARAPAN, Dr. Dody Hartanto, M.Pd. Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**

Beberapa hari lalu, pada tanggal 22 Maret 2021 ada peristiwa yang sudah ditunggu banyak siswa dan orang tua di kelas XII. Tanggal tersebut dilakukan pengumuman hasil SNMPTN 2021 bagi siswa se Indonesia.

Dibalik hiruk pikuk pengumuman SNMPTN masih ada banyak siswa yang kemudian merasa takut, cemas dan kehilangan harapan. Masalah yang dihadapi siswa untuk masuk perguruan tinggi ternyata bukan hanya tes seleksi atau soal yang akan dihadapi. Namun, ternyata juga kadang karena mereka tidak mengetahui jurusan apa yang harus dipilih untuk melanjutkan studi. Pada sisi lain, ada siswa yang mengalami permasalahan dengan orang tua mereka.

Banyak orang tua yang mengarahkan pilihan jurusan kepada anak dengan harapan dapat mengikuti kesuksesan yang telah diraih. Bahkan tidak jarang menjadi ajang kompetisi, persaingan terselubung antar orang tua tanpa disadari. Hal ini tentu berbahaya dan dapat merugikan perkembangan dan masa depan anak.

Fenomena Diploma Disease atau bisa disebut gila memperoleh ijazah ini telah dipopulerkan Ronald Dore pada 1976. Tulisan Dore merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi kondisi nyata dari masyarakat. Berbagai studi dan literatur menunjukkan bahwa pendidikan telah lama dikaitkan dengan ekonomi. Studi lanjut di Perguruan Tinggi pada hakekat untuk menambah bekal dan peningkatan kapasitas serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja dan

kehidupan masa depan. Namun, tanpa disadari lalu pemakaian mengenai melanjutkan studi dipersempit menjadi memperoleh gelar dan ijazah.

Dore (1976) membuat perbedaan antara sekolah yang mendidik dan sekolah yang hanya menghasilkan kualifikasi untuk bekerja. Dia berpendapat bahwa efek dari sekolah, cara itu mengubah kapasitas dan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu tidak hanya bergantung pada apa yang dia pelajari atau cara dia mempelajarinya, tetapi juga pada mengapa dia mempelajarinya. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai upaya untuk menambah penanaman nilai kebaikan dan penyiapan seorang individu di masa yang akan datang.

Seseorang mengalami masalah gila menjadi sarjana ini memunculkan berbagai masalah. Individu menjadi tidak bahagia dalam menjalani studi atau bahkan mengalami kegagalan studi. Masalah lain yang diperoleh adalah tidak terpenuhinya kompetensi yang diperlukan pada satu pekerjaan, sehingga saat bekerja individu akan rentan bermasalah dengan perusahaan atau atasan. Selain itu, bagi orang tua dengan ekspektasi yang berlebihan justru akan menimbulkan banyak kekecewaan dan tekanan. Berbagai tekanan tersebut bagi orang tua jika tidak dapat dikelola dengan baik akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Fenomena gila ijazah ini harus terus kita minimalisir, agar tidak menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Ada rumus kecil yang dapat kita jadikan panduan untuk meminimalisir masalah tersebut. Rumus tersebut ditingkatkan dengan WARAS. Pertama kita WAJIB melakukan komunikasi dengan anak mengenai pilihan studi di perguruan tinggi. Jangan biarkan anak hanya mengikuti pilihan atau ajakan teman sebaya tanpa mengetahui alasan dibalik pilihan tersebut. Kedua perlu mencari rujukan dari pilihan studi yang akan dilakukan. Rujukan ini bisa dari literature atau bacaan atau bisa juga testimoni dari orang-orang yang sudah sukses. Ketiga adalah siapa rencananya yang lain apabila anak tidak dapat diterima atau masuk pada pilihan yang telah menjadi kesepakatan. Perencanaan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin gagal atau tidak bisa diterima di Perguruan Tinggi yang diinginkan. Sekolah memang merupakan hal penting, namun tidak hanya ijazah sebagai tujuan utama.

Menjawab pertanyaan di atas tentang siapa yang salah ketika gila memperoleh ijazah, sangat mungkin semua memiliki andil kesalahan. Oleh karena menjadikan anak dan orang tua tetap WARAS merupakan hal yang lebih penting. Menjadikan anak tangguh (kuat), tanggon (semangat pantang menyerah), tatag (tidak mudah was), teteg (tidak mudah terpengaruh), dan tutug (sampai pada apa yang diinginkan) merupakan hal yang lebih utama. (\*)